BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS GAMPONG KAYEE LEE KECAMATAN INGIN JAYA DAN GAMPONG ATEUK MON PANAH KECAMATAN SIMPANG TIGA KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Gampong Nomor 02/Tapem/PBU/2017 tanggal 29 Desember 2017 bertempat di Kecamatan Simpang Tiga telah disepakati batas wilayah antara Gampong Kayee Lee di Kecamatan Ingin Jaya dengan Gampong Ateuk Mon Panah di Kecamatan Simpang Tiga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Gampong Kayee Lee Kecamatan Ingin Jaya dan Gampong Ateuk Mon Panah Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG BATAS GAMPONG KAYEE LEE KECAMATAN INGIN JAYA DAN GAMPONG ATEUK MON PANAH KECAMATAN SIMPANG TIGA KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Gampong.
8. Batas Gampong adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Gampong yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dengan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah sebuah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di Bumi terhadap garis khatulistiwa (utara atau selatan).
11. Titik kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Gampong yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Gampong.

BAB II

BATAS GAMPONG

Pasal 2

Batas Wilayah Gampong Kayee Lee Kecamatan Ingin Jaya dan Gampong Ateuk Mon Panah Kecamatan Simpang Tiga adalah sebagai berikut :
a. mon pegade/sisi jalan;
b. kebun;
c. sisi batas komplek perumahan dan sawah;
d. sisi berbatasan perumahan dan tanah a.n. Dian Patria;
e. sisi depan rumah a.n. Tajus; dan
f. pintu air.

Pasal 3

Penegasan Batas Wilayah Gampong Kayee Lee Kecamatan Ingin Jaya dan Gampong Ateuk Mon Panah Kecamatan Simpang Tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimulai dari :

1. Mon Pegade (PBU 001) disisi Jalan Kayee Lee mengarah ke Timur sejauh 132,2 meter mengikuti pematang sawah, kemudian ke arah selatan sejauh 40 meter, lalu 16 meter ke arah Timur, dilanjutkan 15,8 meter ke arah Selatan. Selanjutnya bergerak ke arah 45,7 meter ke arah Timur dan 56,2 meter ke arah Selatan di kebun (PBU 002). Dari PBU 002, menuju Selatan sepanjang 75,8 meter sampai ke sisi komplek perumahan yang berbatasan dengan sawah (PBU 003). Lalu mengikuti batas komplek perumahan dan sawah ke arah Timur sejauh 129,5 meter sampai pada tanah milik a.n. Dian Patria (PBU 004). lalu mengikuti sisi perumahan ke arah Selatan sejauh 39,2 meter. Selanjutnya ke arah Timur melewati tanah milik a.n. Dian Patria (mengikuti pematang) sejauh 45,1 meter sampai ke jalan lingkungan di sisi rumah An. Tajus (PBU 005). Kemudian menuju Timur mengikuti jalan lingkungan sejauh 149,4 meter sampai akhir komplek perumahan yang berbatasan dengan sawah, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara sejauh 8 meter dan mengikuti pematang sawah menuju Timur sampai pada pintu air (PBU 006), yang telah disepakati sebagai batas antara 3 (tiga gampong).

2. Daftar koordinat titik kartometrik batas gampong dan Pilar Batas Utama (PBU) gampong hasil dari penegasan batas sebagai berikut:

Nomor Pilar Batas Utama (PBU)	Koordinat		Keterangan Lokasi
	X	Y	
TK11.06.10.2054-18.2003-001	95° 21' 13,7"	5° 29' 29,4"	Mon Pegade/ sisi jalan
TK11.06.19.2006-19.2012-002	95° 21' 20,0"	5° 29' 25,3"	Kebun
TK11.06.19.2006-19.2012-003	95° 21' 20,3"	5° 29' 22,8"	Sisi batas komplek perumahan dan sawah
TK11.06.19.2006-19.2012-004	95° 21' 24,2"	5° 29' 22,9"	Sisi berbatasan perumahan dan tanah An. Dian Patria
TK11.06.19.2006-19.2012-005	95° 21' 25,6"	5° 29' 21,4"	Sisi depan rumah An. Tajus
TK11.06.19.2006-19.2012-006	95° 21' 32,1"	5° 29' 30,9"	Pintu Air

Pasal 4

Peta batas gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 6 April 2018 M
19 Rajab 1439 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 6 April 2018 M
19 Rajab 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018 NOMOR 12